

## ***ABSTRACT***

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a *good governance*. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable *good governance* to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003 ,there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality. Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a *maturity framework*, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government.

This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it's left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research methodology. Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped.

*Keywords:* *Indonesia e-Government Process Maturity Framework*

ix + 130 pages; 8 figures; 44 tables; 3 attachments

Bibliography: 41 (1997-2008)

## ABSTRAK

Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki *good governance*. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, *good governance* dapat dicapai dengan menerapkan e-Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Government, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government.

Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan *framework* untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi *Soft System Methodology* (SSM). Dalam proses pengembangan *framework* ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan *framework* dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan *maturity framework*, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

Kata Kunci: *Process Maturity Framework* Pada e-Government di Indonesia

xiii + 130 halaman; 8 gambar; 44 tabel; 3 lampiran

Bibliography: 41 (1997-2008)